

KONTEKTASIPOLITIK PENDIDIKAN ISLAM MASA KOLONIALISMEAawal ERA KEBANGKITAN ABAD XX

Supandi¹

A. Pendahuluan

Dalam catatan sejarah Indonesia, ditulis bahwa setelah masa-masa kerajaan, sebagaimana telah terbentuk di bumi Nusantara ini, secara perlahan, kolonialisme Belanda telah berusaha untuk menguasai bumi Nusantara ini dengan berupaya untuk menguasai daerah-daerah di kepulauan yang merupakan cikal bakal negara Indonesia. Pada periode awal, pemerintah Belanda berusaha untuk menguasai berbagai sektor, utamanya dalam dunia perekonomian, dengan melalui penguasaan sektor perdagangan Hindia Belanda atau yang kemudian dikenal dengan istilah VOC yang berlangsung pada sekitar tahun 1596 M hingga abad XIX Masehi.²

Upaya untuk melanggengkan kekuasaan pemerintahan Belanda tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang salah satunya adalah dengan melakukan dan menerapkan pemerintahan akomodatif terhadap umat Islam yang pada saat itu merupakan kelompok terbesar di bumi Nusantara. Dalam tataran praktek, para gubernur jenderal Belanda membiarkan hukum Islam berlaku di tengah-tengah masyarakat, sementara dalam tataran teoritis, beberapa sarjana Belanda mengemukakan teori bahwa keberlakuan hukum Islam bagi masyarakat muslim di Nusantara. Mereka diantaranya adalah Salomon Keyzer sekitar tahun 1823-1868 dan Willen Christian van Den Berg pada tahun 1845-1927. Mereka berpendapat bahwa bagi orang Islam, berlaku hukum Islam, meskipun tidak harus sama dengan yang dipaparkan oleh umat Islam yang berada di Timur Tengah.³

Dengan demikian, pemerintah Belanda, telah memberikan kelonggaran dalam persoalan hukum Islam, dengan harapan, mereka memperoleh simpati positif dari umat Islam yang ada di bumi Nusantara tersebut. Namun seiring dengan perjalanan waktu, secara perlahan tetapi pasti, pemerintah Belanda telah berusaha dengan keras untuk mencampuri urusan keagamaan penduduk pribumi. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di negeri Belanda maupun di wilayah jajahan Hindia Belanda. Tujuan pemerintahan Belanda adalah berusaha untuk menghilangkan pengaruh Islam di negerinya sendiri hingga daerah kekuasaan dan jajahan Belanda tersebut, karena mereka menganggap bahwa Islam akan menghambat tujuan mereka dalam melakukan jajahan di wilayah mereka. Bahkan hal

¹Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan.

²VOC adalah *Verenigde Oost Indische Compagnie* dan kemudian berganti pada abad pertengahan sekitar abad XIX Masehi hingga berakhirnya kekuasaan Belanda. Lihat Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), 267.

³J.F. Holleman, ed., *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law* (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1981), 2.

tersebut diperparah lagi dengan dicetuskannya sebuah keputusan para raja yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Februari 1859 yang membenarkan para gubernur jenderal Hindia Belanda untuk mencampuri masalah agama dan mengawasi setiap gerak gerik para ulama' jika dipandang perlu untuk keamanan dan ketertiban.⁴ Hal ini menimbulkan berbagai pertentangan dari berbagai daerah, seperti di daerah Aceh yang lebih suka untuk memberlakukan hukum adat daripada hukum Belanda waktu itu. Masyarakat Aceh beralasan bahwa hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat berakar kepada kesadaran hukum mereka sejak dahulu dan ini berhasil membuat masyarakat yang damai dan tertib.⁵ Bahkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto, pada awal abad XX Masehi tercatat telah tiga kali pemerintah kolonial Belanda ingin menerapkan hukum Barat untuk penduduk pribumi. *Pertama* pada tahun 1904 ketika P.J. Idenburg yang menjabat sebagai menteri kolonial Belanda mengajukan rancangan undang-undang kodifikasi hukum perdata BW untuk semua penduduk Indonesia. *Kedua* pada tahun 1919 ketika B. Pleyte mencoba untuk mengenalkan rancangan undang-undang tentang hak kepemilikan tanah pribumi berdasarkan hukum Eropa. *Ketiga* pada tahun 1923 M ketika F.J.H. Cowan membuat rancangan baru unifikasi KUH perdata untuk penduduk pribumi, namun semuanya di gagalkan oleh Van Vollen Hoven yang menginginkan penerapan hukum adat dalam masyarakat pribumi.⁶

Masyarakat muslim pada awal abad XX Masehi merupakan masyarakat yang sedang bangkit. Mengenai periode ini, Riclefs mengatakan bahwa suatu jaman baru sedang menysing. Hal tersebut ditandai dengan kelahiran gerakan pembaharuan Islam.⁷ Semua hal tersebut juga berimplikasi terhadap implementasi pendidikan yang diterapkan di bumi Nusantara ini, mengingat pendidikan merupakan sebuah upaya untuk mengubah manusia dengan pengetahuan tentang sikap serta perilaku yang sesuai dengan kerangka nilai dan ideology. Pendidikan juga merupakan sebuah proses mendekatkan manusia pada tingkat kesempurnaannya dan mengembangkan kemampuannya yang dipandu oleh ideology dan akidah, sehingga dengan demikian, pemerintah Belanda sadar betul terhadap hal ini. Pendidikan pada saat itu dikekang dan dilarang untuk tumbuh dan berkembang di Nusantara. Belanda berharap bahwa bangsa Indonesia ini terlelap dengan buaian kosong yang dijanjikan oleh pemerintah kolonial Belanda.

B. Pembahasan

⁴Husnul Aqib Suminto, *Politik Hindia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1996), 10.

⁵Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 35.

⁶Baca Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 123-130.

⁷Helen N. Boyle, *Memorization and Learning in Islamic Schools ; Comperative Education Review*, Vol. 50, No. 3 (2006), 478-499.

Dengan pendidikan yang rendah dari bangsa Indonesia, maka Belanda dapat dengan mudah untuk membohongi penduduk pribumi yang ujung-ujungnya beranggapan bahwa mereka akan sulit untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan. Itu berarti bahwa pemerintah Belanda akan semakin lama untuk menguasai bumi Nusantara. Di antara kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam bidang pendidikan pada saat itu yang menyengsarakan bangsa Indonesia adalah :

1. Proyek Pendidikan Kolonial Belanda

Pada tahun 1899, C.Th. van Deventer, salah seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Indonesia selama tujuh belas tahun dari tahun 1880-1897, telah menerbitkan sebuah artikel yang berjudul *Een eereschuld* atau dalam bahasa Indonesia adalah suatu utang kehormatan di jurnal terbitan Belanda *de Gids*. Dalam jurnal tersebut ditulis bahwa negeri Belanda berutang kepada bangsa Indonesia dan utang itu sebaiknya dibayar dengan cara memberikan prioritas utama dengan cara memberikan skala prioritas kepada kepentingan rakyat dalam kebijakan pemerintah penjajahan. Hal ini membawa dampak kepada dicetuskannya keputusan Ratu Wilhelmina tahun 1890-1948 tentang kesejahteraan di Jawa dan menekankan urgensi kewajiban etis dan tanggung jawab moral terhadap negeri jajahan. Dengan demikian, politik etis (*ethische politiek*) secara resmi telah disahkan.

Sehingga hal tersebut berdampak kepada perubahan yang cukup mendasar di lingkungan penjajahan, sehingga Furnivall menyebutkan bahwa jaman ini adalah jaman ekspansi, efisiensi dan kesejahteraan. Implikasi yang cukup penting dalam kebijakan ini adalah proyek pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah Belanda. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan perluasan pendidikan gaya Barat yang merupakan tanda resmi pelaksanaan politik etis, yang tentunya dengan perluasan proyek pendidikan ini, maka akan berdampak yang kepada semakin besarnya jumlah kelompok masyarakat terpelajar yang kemudian terbentuk menjadi kelas sosial tersendiri dalam masyarakat Indonesia yang sedang mengalami suatu perubahan. Pembukaan sekolah “dokter Jawa” yang dikenal dengan istilah STOVIA, dan kemudian menjadi sarana mobilitas sosial kelompok priyayi rendah, pedagang dan keluarga-keluarga tertentu dipedesaan.⁸

2. Aspek Kelembagaan Pendidikan Islam Abad XX

Kelembagaan pendidikan Islam awal abad XX Masehi, berada dalam ruang lingkup lembaga pendidikan pesantren⁹ dan lembaga pendidikan madrasah, dengan menggunakan

⁸Menurut Jaarlijks Verslag School tot Opleiding van Inlandse Arsten pada tahun 1904-1905, pendaftar dan lulusan “dokter-Jawa” atau STOVIA masing-masing berjumlah 743 dan 160 siswa. Dari jumlah pendaftar tersebut, 146 orang berasal dari keluarga priyayi dan keluarga kaya, 278 dari keluarga priyayi rendah dan keluarga menengah sedangkan 319 berasal dari kelas rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah tersebut merupakan media untuk pergerakan mobilitas sosial masyarakat Indonesia.

⁹Istilah pondok berasal dari bahasa Arab yaitu *funduq*, yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana. Lihat Abid al-Bisri, *Kamus Al-Bisri* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 564; Wahjoetomo, *Pesantren* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 70. Sedangkan dalam istilah lain dikatakan bahwa *pesantren* berasal dari kata *pe-santri-an*, yang berarti *murid* dalam bahasa Jawa, dan dapat diartikan tempat santri belajar. Pendapat lainnya, *pesantren* berasal dari kata *santri* yang mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an*. Haidar Putra

pola manajemen dan administrasi yang masih cukup sederhana. Sedangkan cita-cita kedua lembaga pendidikan tersebut adalah cenderung kepada tujuan yang normatif, yaitu bertujuan kepada keagamaan saja yang fokus kepada kemaslahatan akhirat semata. Secara kelembagaan, pendidikan Islam berupa lembaga pesantren dan madrasah tersebut, telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Oleh karena itu mereka diarahkan dan dituntut untuk melakukan langkah-langkah ke arah perwujudan visi dan misi kependidikan Islam yang sekaligus populis, berkualitas dan beragam. Hal tersebut dilakukan dengan berdasarkan kepada landasan paradigma pengelolaan manajemen yang didukung oleh langkah-langkah yang cukup strategis. Dengan melalui suatu perwujudan visi dan misi lembaga kependidikan Islam tersebut, kemudian lembaga pendidikan Islam tersebut mengalami sebuah perkembangan dan kemajuan secara kontinyu sebagaimana yang diharapkan.

Sejarah perkembangan madrasah di Indonesia terkait juga dengan berbagai macam faktor yang kompleks karena pesantren dan madrasah merupakan gerakan pembaharuan Islam (*Islamic reform movement*) dan sistem pendidikan Belanda merupakan tiga faktor yang penting dan secara bersama-sama menyediakan sebuah *environment* bagi kemunculan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren dan madrasah di Indonesia.¹⁰ Madrasah di Indonesia merupakan lembaga pendidikan yang sangat dinamis sebagai hasil interaksi madrasah dengan modernisasi yang berlangsung secara berkelanjutan, sehingga pada akhirnya mendorong untuk memunculkan lembaga-lembaga pendidikan Islam ideal yang bercirikan khas ke-Indonesia-an.¹¹ Pertemuan antara lembaga pendidikan Islam, seperti lembaga pendidikan pesantren, madrasah dan juga eksperimen pendidikan Islam modern serta organisasi keagamaan yang telah terjadi, telah menghasilkan lembaga-lembaga

Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 26. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa kata *santri* berasal dari kata *cantrik* dalam bahasa Sanskerta atau mungkin Jawa yang berarti orang yang selalu mengikuti guru. Kata ini kemudian dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut *pawiyatan*. Istilah *santri* juga ada dalam bahasa Tamil, India, yang berarti guru mengaji. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *pesantren* diartikan sebagai asrama, tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji. Umi Chultsum dan Windy Novita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kasiko, 2006), 531. Sedangkan secara istilah *pondok pesantren* adalah lembaga pendidikan orang-orang Islam yang para santri biasanya tinggal di pondok atau asrama dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik yang bersifat tradisional dan kitab-kitab umum, yang bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail serta mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat. Namun *pondok pesantren* secara definitif tidak dapat diberikan batasan yang tegas, melainkan terkandung fleksibilitas pengertian yang memenuhi ciri-ciri yang memberikan kata pondok berasal dari *funduq* (bahasa Arab) yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat penampungan sederhana dari para pelajar atau para santri yang jauh dari tempat asalnya. Sedangkan menurut Zubaedi, pondok pesantren adalah salah satu model pendidikan Islam yang berbasis masyarakat yang kemudian dikenal dengan istilah perguruan swasta yang memiliki kemampuan tinggi dalam berswakarsa dan swakarya dalam menyelenggarakan suatu program pendidikan, yang bertujuan untuk membentuk tatanan sosial melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan yang bernuansa Islam. Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Kontribusi Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 15.

¹⁰Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 73.

¹¹Sebagai contohnya adalah sekolah Islam yang secara formal berbeda dengan madrasah yang pada akhirnya hal tersebut menjadi cikal bakal keragaman lembaga pendidikan Islam modern di Indonesia.

pendidikan Islam di Indonesia dalam bentuk yang sekarang ini. Lembaga pendidikan Islam mengalami kemajuan yang signifikan, sehingga hal tersebut diperkirakan terjadi sekitar abad XX Masehi. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya para santri yang diperkirakan mencapai jumlah lebih dari 300.000 orang.¹²

Proyek pendidikan pemerintah kolonial Belanda dimulai sejak akhir abad XIX dan awal abad XX Masehi. Dengan demikian, kegiatan proyek ini membawa implikasi kepada kalangan yang sangat terbatas untuk memperoleh kesempatan belajar di sekolah yang asal mulanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa, sehingga pada beberapa dekade setelah tahun 1816 M, pemerintah kolonial Belanda membuka sekolah bagi anak-anak pribumi.¹³ Sekolah tersebut didirikan untuk membentuk dan mencetak para administrator dari kalangan pribumi dan hal ini diikuti dengan mendorong para keluarga Eropa untuk mengambil anak-anak priyayi untuk belajar dan hidup dilingkungan keluarga Eropa.¹⁴

Selain hal tersebut, pemerintah kolonial Belanda telah membuka sekolah guru untuk sekolah Jawa dan sekolah “dokter-Jawa” yang diperuntukkan bagi rakyat pribumi dalam hal pelayanan kesehatan.¹⁵ Namun usaha tersebut masih dirasakan kurang untuk mencukupi kebutuhan rakyat priumi, sehingga pada tahun 1879 pemerintah kolonial Belanda kembali membuka *Hoofdenschoolen* atau sekolah para kepala. Pendirian sekolah ini bertujuan untuk mendidik para anak bupati dalam bidang administrasi.¹⁶ Proyek pendidikan ini berkelanjutan hingga pada masa pembukaan lembaga pendidikan dasar yang kemudian disebut dengan sekolah kelas satu dan sekolah kelas dua yang dimulai pada tahun 1893.

Dalam dunia pendidikan Islam sendiri, implementasi modernisasi lembaga pendidikan juga terjadi. Hal tersebut ditandai dengan adanya Mahmud Yunus pada sekitar tahun 1909 yang merupakan salah satu tonggak bagi kemunculan modernisasi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Hal tersebut diimplementasikan dengan pendirian sebuah lembaga pendidikan bernama *Adabiyah School* oleh Abdullah Ahmad yang merupakan lembaga pendidikan Islam pertama yang menggunakan sistem berkelas, memakai bangku, meja dan papan tulis.¹⁷ Sekolah tersebut mengkombinasikan mata pelajaran agama dengan materi umum dan menggunakan metode proses belajar mengajar yang diadopsi dari sekolah Belanda. Karena sekolah ini merupakan sekolah eksperimen, maka eksistensi sekolah ini hanya bertahan sekitar enam bulan yang kemudian berubah nama menjadi *HIS Adabiyah* yang ada di Minangkabau.¹⁸ Oleh karena itu, Abdullah Ahmad merasa kehilangan

¹²Martin van Bruenessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1999), 25.

¹³Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia*, 101.

¹⁴Robert van Neil, *The Emergence of the Modern Indonesia Elite* (Dordrecht the Netherland: Poris Publication and KITLV, 1984), 28-29.

¹⁵Ibid, 28.

¹⁶Ibid, 27.

¹⁷Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), 63.

¹⁸Sekolah HIS ini adalah sekolah pertama yang memperoleh subsidi dari pemerintah Belanda yang ada di daerah Minangkabau. Lihat Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia*, 107.

kesempatan untuk mengadakan pembaharuan agama,¹⁹ karena sekolah yang dibangunnya sudah dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda.

Selain *Adabiyah School*, lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lain juga didirikan, salah satunya adalah *Madras School* di daerah Batusangkar oleh Syaikh Umar Thalib. Di samping itu juga terbentuk sekolah bernama *Diniyah Putri* di Padang Panjang yang didirikan oleh Rahmah al-Yanusi.

3. Ketenagaan Pendidikan Islam

Perkembangan pendidikan Islam pada awal abad XX Masehi tampil dengan wajah fenomena dan beragam. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pada akhir abad XIX Masehi dan sekaligus merupakan awal dari abad XX Masehi, pemerintah kolonial Belanda telah mengeluarkan kebijakan yang cukup memberikan peluang bagi para rakyat pribumi untuk bisa mengenyam dunia pendidikan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh penerapan politik etis oleh ratu Ratu Wilhelmina pada tahun 1890-1948, sehingga pada akhirnya berimplikasi kepada dibukanya sekolah-sekolah yang diperuntukkan kepada para rakyat pribumi.

Salah satu sekolah yang memang dikhususkan bagi pembentukan tenaga-tenaga administrasi, yaitu sekolah *Hoofdenschoolen* atau sekolah para kepala yang nantinya dipersiapkan bagi para anak bupati dan lain sebagainya. Artinya, dari sisi ketenagaan, lembaga ini mengkhususkan bagi kalangan kepala sekolah untuk mengajar para keturunan bangsawan, sedangkan untuk keturunan pribumi tidak mendapatkan perlakuan tersebut. Selain itu, pendirian lembaga pendidikan *Adabiyah School*, yang dalam Ensiklopedi Islam disebut dengan Sekolah Modern,²⁰ maka pada masa berikutnya juga didirikan lembaga pendidikan dengan nama *Madras School* yang didirikan oleh Syaikh Umar Thalib.

Jika dilihat dari aspek ketenagaan, lembaga pendidikan Islam mulai dari *Adabiyah School* dan *Madras School*, kemudian juga *Madrasah Jami'atul Khair* yang didirikan di Jakarta serta yang lainnya tersebut sudah benar-benar dipersiapkan. Hal tersebut dilakukan untuk memodernisasikan lembaga pendidikan Islam dan ini dapat dilihat dari pendirian Persatuan Guru Agama Islam atau PGAI pada tahun 1918, yang diprakarsai oleh Abdullah Ahmad dan para ulama yang ada di Minangkabau. Pada perkembangannya, organisasi ini kemudian memiliki kekuatan politik yang dapat menekan pemerintah Belanda, terutama yang berkaitan dengan kebijakan politik pendidikan yang dianggap tidak adil, bahkan pemerintah Belanda memperketat pengawasan lembaga pendidikan Islam. Hal tersebut terlihat dari penerapan *ordonasi* yang menganggap lembaga pendidikan Islam sebagai *Wilde*

¹⁹Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1996), 41.

²⁰Hafizh Dasuki dkk, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), 57.

School atau sekolah liar.²¹Selain itu, guru juga harus memiliki ijin dari pemerintah Belanda dulu untuk melaksanakan tugas mengajar mereka.

4. Kurikulum Pendidikan Islam Masa Kolonial Belanda

Implementasi lembaga pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang berkepribadian Islami. Artinya, cara berpikirnya harus didasarkan kepada nilai-nilai agama Islam serta berjiwa sesuai dengan ruh dan nafas yang juga Islam. Metode pendidikan dan pengajarannya juga harus dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Karena setiap metodologi yang tidak berorientasi kepada pencapaian tujuan tersebut, tentu akan dihindarkan. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan Islam bukan semata-mata melakukan *transfer of knowledge* semata, akan tetapi juga memperhatikan ilmu pengetahuan yang diberikan itu mampu mengubah sikap atau tidak. Rangkaian selanjutnya adalah tahap merealisasikannya sehingga dibutuhkan program pendidikan dan kurikulum yang selaras, serasi dan berkesinambungan dengan tujuan di atas.

Terdapat beberapa paradigma mendasar bagi sistem pendidikan Islam. *Pertama* adalah prinsip kurikulum, strategi dan tujuan pendidikan didasarkan pada akidah Islam, dengan tujuan untuk membentuk SDM terdidik dengan *'aqliyah Islâmiyah* atau pola berpikir Islami dan *nafsiyah Islâmiyah* atau pola sikap Islami. *Kedua* adalah pendidikan harus diarahkan kepada pengembangan keimanan, sehingga akhirnya akan melahirkan amal salih dan ilmu yang bermanfaat. *Ketiga* adalah pendidikan ditujukan untuk membangkitkan dan mengarahkan potensi-potensi, baik yang ada pada diri setiap manusia yang selaras dengan fitrah manusia. *Keempat* adalah keteladanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pendidikan. *Kelima* adalah strategi dan arah perkembangan ilmu pengetahuan. *Keenam* adalah tujuan utama ilmu yang dikuasai manusia adalah untuk mengenal Allah SWT. *Ketujuh* adalah ilmu harus dikembangkan agar menciptakan manusia yang hanya takut kepada Allah SWT. *Kedelapan* adalah ilmu yang dipelajari ditujukan untuk menemukan keteraturan sistem, hubungan kausalitas dan tujuan alam semesta. *Kesembilan* adalah ilmu dikembangkan untuk mengambil manfaat dari ibadah kepada Allah SWT. *Kesepuluh* adalah ilmu yang dikembangkan dan teknologi yang diciptakan tidak ditujukan untuk menimbulkan kerusakan di bumi.

Mengingat lembaga pendidikan Islam yang berdiri pada sekitar abad XX Masehi itu masih tergolong kepada kategori masih sedikit, dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa pada tahun 1922 hanya ada sekitar 15 lembaga pendidikan Islam yang mengikuti sistem lembaga pendidikan seperti *Diniyah School* dan tergolong kepada kategori modern, karena didalamnya memasukkan unsur-unsur pelajaran umum seperti bahasa, matematika, sejarah, geografi dan kesenian atau musik.²² Transformasi kebijakan materi pelajaran yang diterapkan di lembaga pendidikan seperti di *Madras School* tersebut juga lebih menekankan

²¹Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia*, 110.

²²Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, 66.

pada muatan kurikulum bahasa Arab, demi untuk bisa mengakses pelajaran Islam pada sumber aslinya, mengingat kitab-kitab yang kemudian dijadikan rujukan dalam kegiatan pendidikan tersebut mayoritas menggunakan bahasa Arab.

5. Kebijakan Anggaran Bagi Pendidikan Islam

Pada awal abad XX Masehi, di dunia muslim muncul kesadaran baru untuk melakukan reformasi pendidikan Islam secara komprehensif dan tidak terpisahkan dari usaha Islamisasi ilmu²³ untuk membangun peradaban Islam di masa depan. Pada dekade itu, di Indonesia terjadi masuknya gelombang sekulerisasi besar-besaran sebagai imbas dari gelombang yang lebih besar dari skala global.²⁴ Ini berarti reformasi pendidikan Islam saat itu digagas oleh para pakar sebagai jawaban langsung terhadap arus sekulerisasi yang sangat membahayakan bagi umat Islam. Secara substantif, para pakar berusaha untuk mengadakan kegiatan reformasi pendidikan Islam guna mengembalikan pendidikan Islam kedalam pengaruh Islam, seperti pada masa kejayaan peradaban Islam.

Terkait dengan anggaran pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah pemerintah hanya menanggung biaya operasional lembaga pendidikan yang didirikan oleh Belanda itu sendiri, sedangkan lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat pribumi, mereka mengeluarkan biaya sendiri untuk operasional sekolah tersebut. Adapun salah satu lembaga pendidikan yang mendapatkan subsidi biaya dari pemerintah kolonial Belanda adalah *Adabiyah School* karena keberadaan sekolah ini sudah diambil alih oleh pemerintah Belanda.

6. Tinjauan Politik Pendidikan Islam : Perspektif Tujuan

Tujuan pendidikan dalam Islam adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram dan sistematis dalam rangka membentuk manusia yang memiliki:

- a. *Kepribadian Islam*. Tujuan ini merupakan konsekuensi keimanan seorang muslim, yaitu keteguhan hati, dalam memegang identitas kemuslimannya dalam pergaulannya sehari-hari. Identitas itu tampak kepada dua aspek fundamental, yaitu pola pikir (*'aqliyah*) dan pola sikap (*nafsiyah*) yang berpijak pada akidah Islam.
- b. *Menguasai tsaqafah Islamiyah dengan andal*. Islam mendorong setiap muslim untuk menjadi manusia yang berilmu dengan cara mewajibkannya agar selalu menuntut ilmu berdasarkan takaran kewajibannya.²⁵
- c. *Menguasai ilmu-ilmu terapan yang meliputi pengetahuan, ilmu dan teknologi*. Menguasai IPTEK diperlukan agar umat Islam mampu mencapai kemajuan material

²⁴Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam Dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik*(Jakarta: Erlangga,2005), 234.

²⁵Menurut al-Ghazali, ilmu dibagi menjadi dua kategori, yaitu (1) ilmu yang *fardhu 'ain*, yaitu wajib dipelajari setiap muslim, seperti ilmu-ilmu *tsaqâfah* Islam yang terdiri konsep, ide dan hukum Islam atau *fiqh*, bahasa Arab, sejarah hidup Nabi SAW, studi al-Qur'an, *tahfidz* al-Quran, studi hadits, *ushul fiqh* dan sebagainya (2) ilmu yang *fardhu kifayah*, biasanya ilmu-ilmu yang mencakup sains dan teknologi serta ilmu terapan-keterampilan, seperti biologi, fisika, kedokteran, pertanian, teknik dan sebagainya.

sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagai *khalifatullah* di muka bumi dengan baik. Islam menetapkan penguasaan sains sebagai *fardhu kifayah*, yaitu kewajiban yang harus dikerjakan oleh sebagian muslim jika ilmu-ilmu tersebut sangat diperlukan umat, seperti kedokteran, kimia, fisika, industri penerbangan, biologi, teknik dan sebagainya. Pada hakikatnya ilmu pengetahuan terdiri atas dua hal, yaitu pengetahuan yang mengembangkan akal manusia sehingga mampu menentukan suatu tindakan tertentu dan pengetahuan mengenai perbuatan itu sendiri.

- d. *Memiliki keterampilan yang tepat guna dan berdayaguna.* Penguasaan keterampilan yang serba material ini merupakan tuntutan yang harus dilakukan umat Islam sebagai pelaksanaan amanat Allah SWT. Hal ini diindikasikan dengan terdapatnya banyak *nash* yang mengisyaratkan setiap muslim untuk mempelajari ilmu pengetahuan umum dan keterampilan, sehingga hal ini dihukumi sebagai *fardhu kifayah*.

Tujuan pendidikan Islam bukan hanya menjadi tempat pembekalan pengetahuan kepada anak bangsa, tetapi juga lembaga penanaman nilai, pembentuk sikap dan karakter. Anak-anak bangsa dikembangkan bakatnya, dilatih kemampuan dan keterampilannya. Sekolah tempat menumbuhkembangkan potensi akal, jasmani dan ruhani secara maksimal, seimbang dan sesuai tuntutan jaman. *Output* keseluruhan proses pendidikan adalah menyiapkan siswa untuk bisa merealisasikan fungsi penciptaannya sebagai hamba Tuhan dan kemampuan mengemban amanah mengelola bumi untuk dihuni secara aman, nyaman, damai dan sejahtera.

C. Penutup

Pada awal abad XX Masehi merupakan kebangkitan umat Islam karena pada abad tersebut merupakan awal pemberian peluang rakyat pribumi untuk mengenal pendidikan. Jika pada dekade sebelumnya, yaitu pada masa awal abad XIX Masehi dan sebelumnya, rakyat pribumi dilarang untuk berskolah, karena mereka dianggap tidak pantas untuk mengenyam pendidikan dan pendidikan hanya diperuntukkan bagi anak-anak para kaum priyayi dan orang kaya serta para pejabat pemerintah Belanda, sehingga hal tersebut mengakibatkan semakin terlelanya rakyat pribumi dalam buaian penjajahan Belanda. Namun berdasarkan keputusan Ratu Wilhelmina yang memberlakukan politik etis yang kemudian akhirnya memberikan ruang gerak bagi rakyat pribumi untuk bisa mengenyam dunia pendidikan, meskipun pada saat itu masih belum menyeluruh dan utuh, karena lembaga pendidikan yang didirikan pada waktu itu masih terbatas kepada para anak-anak priyayi menengah kebawah, seperti sekolah “dokter-Jawa” dan *hofdenscholen* yang diperuntukkan oleh para anak-anak bupati dan lain sebagainya.

Seiring perjalanan waktu, banyak lembaga pendidikan Islam didirikan, yang salah satunya terletak di Minangkabau, yaitu *Adabiyah School*, kemudian disusul lagi dengan

Madras School dan *Madrasatul Khair School* di Jakarta dan lain sebagainya. Keberadaan dan kiprah dari masing-masing lembaga pendidikan tersebut sangat terkait erat dengan politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu, sehingga stabilitas politik pemerintah membawa dampak dan pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan Islam pada abad XX Masehi di Indonesia, terutama pada aspek kelembagaan pendidikan Islam.*

BIBLIOGRAPHY

- Arifin, Bustanul. *Pelembagaan Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Bisri, Abid. *Kamus Al-Bisri*. Surabaya : Pustaka Progresif, 1999.
- Boyle, Helen N. *Memorization and Learning in Islamic Schools ; Comperative Education Review*, Vol. 50, No. 3 (2006).
- Bruenessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Bandung : Mizan, 1999.
- Chultsum, Umi dan Windy Novita. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Kasiko, 2006.
- Dasuki, Hafizh dkk. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2004.
- Holleman, J.F. ed. *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1981.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Neil, Robert van. *The Emergence of the Modern Indonesia Elite*. Dordrecht the Netherland : Poris Publication and KITLV, 1984.
- Qomar, Mujamil. *Epistemologi Pendidikan Islam Dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik*. Jakarta : Erlangga, 2005.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah dan Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta : LP3ES, 1996.
- Subhan, Arief. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Suminto, Husnul Aqib. *Politik Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Wahjoetomo. *Pesantren*. Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1995.

Zubaedi. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren, Kontribusi Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.